

**ANALISIS DETERMINAN AUDITOR INTERNAL PADA  
EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL SEKTOR PUBLIK  
(STUDI PADA INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai syarat untuk penyusunan skripsi

pada program sarjana (S1) Akuntansi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**CHRISTOPHER SEPTIAN NAINGGOLAN**

**NIM. 12030115140097**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2019**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Christopher Septian Nainggolan

Nomor Induk Mahasiswa : 12030115140097

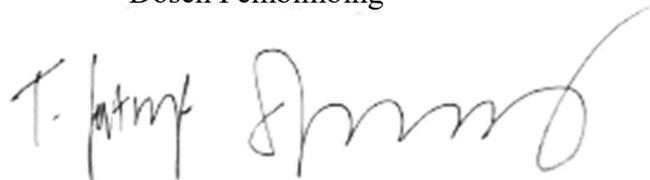
Fakultas/Departemen : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS DETERMINAN AUDITOR  
INTERNAL PADA EFEKTIVITAS AUDIT  
INTERNAL SEKTOR PUBLIK  
(Studi pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta)**

Dosen Pembimbing : Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si., Akt.,  
Ph.D

Semarang, 25 Juni 2019

Dosen Pembimbing



**Tri Jatmiko Wahyu Prabowo S.E., M.Si., Akt.,  
Ph.D**

**NIP. 197110262000031001**

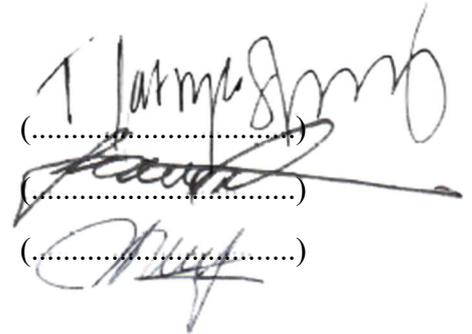
## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Christopher Septian Nainggolan  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030115140097  
Fakultas/Departemen : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS DETERMINAN AUDITOR  
INTERNAL PADA EFEKTIVITAS AUDIT  
INTERNAL SEKTOR PUBLIK**  
**(Studi pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 Juli 2019**

Tim Penguji

1. Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si., Akt., Ph.D (.....)
2. Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt. (.....)
3. Dr. H. Agus Purwanto, M.Si, Akt. (.....)



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Christopher Septian Nainggolan menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Determinan Auditor Internal Pada Efektivitas Audit Internal Sektor Publik** (Studi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,



(Christopher Septian Nainggolan)

NIM : 12030115140097

## ABSTRACT

*This research was conducted with the aim of examining the competence of internal auditors, the support of the auditee, the independence of internal auditors, and the relationship between internal auditors and external auditors in their influence on the effectiveness of internal audits. The population in this study are the internal auditors of DKI Jakarta Provincial Inspectorate which totalling 77 peoples. The sampling method in this study is using convenience sampling. Based from the total population, as many as 55 respondents were willing to become samples in this study. Research data were obtained by giving questionnaires to the respondents. The research hypothesis were tested using multiple regression analysis. The results of the study indicate that auditor competence and the relationship of internal auditors with external auditors have a positive and significant influence on the effectiveness of internal audits, whereas auditor independence and auditee support have no effect on the effectiveness of internal audits.*

*Keywords : The effectiveness of internal audit, auditor competence, auditee support, auditor independence, relations with external auditors.*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kompetensi auditor internal, dukungan *auditee*, independensi auditor internal, dan hubungan antara auditor internal dengan auditor eksternal dalam pengaruhnya terhadap efektivitas audit internal. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal yang bekerja pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 77 orang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Dari jumlah populasi tersebut, sebanyak 55 responden bersedia menjadi sampel dalam penelitian ini. Data penelitian didapatkan dengan memberikan kuesioner kepada responden. Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan *multiple regression analysis*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor dan hubungan auditor internal dengan auditor eksternal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas audit internal, sedangkan Independensi auditor dan dukungan *auditee* tidak mempunyai pengaruh terhadap efektivitas audit internal.

Kata kunci: Efektivitas audit internal, kompetensi auditor, dukungan *auditee*, independensi auditor, hubungan dengan auditor eksternal.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.”*

*(1 Corinthians 10:13)*

*“If you think you are too small to make a differences, try sleeping with mosquito”*

*(Dalai Lama)*

*“Victory comes through harmony.”*

*(Arsenal)*

***Skripsi ini saya persembahkan untuk :***

*Kedua orang tua saya, kedua kakak saya, sahabat, dan semua orang yang selalu mendoakan saya dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kehadiran dari-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Determinan Auditor Internal Pada Efektivitas Audit Internal Sektor Publik (Studi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta). Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo. S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Aditya Septiani, S.E., M.Si, Akt. selaku dosen wali yang memberikan arahan dan nasihat selama perkuliahan.
4. Semua dosen dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah berbagi ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan S1.

5. Kedua orang tua dan kedua kakak penulis atas doa, kasih sayang, semangat, perhatian dan pengertian yang diberikan kepada penulis selama ini.
6. Sahabat saya dari SMA hingga perantauan di Semarang, Kevin Triharnanto yang berjasa besar dalam membantu saya menjalani hidup di Semarang.
7. Sahabat saya selama masa perkuliahan, Andi, Sadewa, Faizal, Fitra, Alif, Khadafy, dan Hafid yang telah memberikan saran dan bantuan selama pengerjaan skripsi ini.
8. Teman saya ibadah ke Gereja, Seto yang juga memberikan saran dan bantuan selama pengerjaan skripsi ini.
9. Keponakan saya yang juga turut membantu saya dalam menjalani kehidupan di Semarang, Grasi
10. Seluruh anggota organisasi EECC dan PRMK FEB Undip telah menjadi keluarga dan memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi.
11. Teman satu bimbingan yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi di pendidikan S1 ini, Suci, Sadewa, Louisa, Dea, dan Khadafy.
12. Sahabat sejak SMA yang selalu menyertai, menyemangati, dan mendukung, Kevin, Satria, Thomas, dan Stefan.
13. Sahabat sejak SMP yang selalu menyertai, menyemangati, dan mendukung, Afrialdi, Jonathan, dan Indra.

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar penulis dapat melakukannya lebih baik lagi. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 25 Juni 2019

Penulis,



Christopher Septian Nainggolan

NIM. 12030115140097

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	12
1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
1.3.1    Tujuan Penelitian .....	16
1.3.2    Manfaat Penelitian .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1    Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	18
2.1.1    Teori Agensi.....	18
2.1.2    Auditor Internal.....	23
2.1.3    Efektivitas Audit Internal.....	24
2.1.4    Kompetensi Auditor Internal.....	26
2.1.5    Hubungan Antara Auditor Internal Dengan Auditor Eksternal .....	27
2.1.6    Dukungan <i>Auditee</i> terhadap Audit Internal.....	29
2.1.7    Independensi Auditor Internal.....	30
2.2    Penelitian Terdahulu.....	32
2.3    Kerangka Pemikiran .....	36
2.4    Pengembangan Hipotesis .....	37
2.4.1    Pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Efektivitas Audit Internal .....	37

2.4.2	Pengaruh Hubungan Auditor Internal dan Audit Eksternal terhadap Efektivitas Auditor Internal.....	40
2.4.3	Pengaruh Dukungan <i>Auditee</i> terhadap Efektivitas Audit Internal ...	42
2.4.4	Pengaruh Independensi Auditor Internal terhadap Efektivitas Audit Internal .....	44
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	46
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	46
3.1.1	Variabel Penelitian.....	46
3.1.2	Definisi Operasional Variabel.....	46
3.2	Populasi dan Sampel .....	57
3.2.1	Populasi Penelitian.....	57
3.2.2	Sampel Penelitian.....	58
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	58
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	59
3.5	Metode Analisis.....	60
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	60
3.5.2	Analisis Hasil Penelitian dan Demografi Responden .....	60
3.5.3	Uji Instrumen .....	61
3.5.4	Uji Asumsi Klasik.....	62
3.5.5	Analisis Regresi Linear Berganda.....	64
3.5.6	Uji Hipotesis .....	65
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	68
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	68
4.2	Analisis Data .....	69
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	69
4.2.2	Analisis Hasil Penelitian dan Demografi Responden .....	75
4.2.3	Uji Instrumen .....	77
4.2.4	Uji Asumsi Kasik.....	82
4.2.5	Uji Hipotesis .....	87
4.3	Interpretasi Hasil .....	92
4.3.1	Pengaruh Kompetensi Auditor dengan Efektivitas Audit Internal ..	92
4.3.2	Pengaruh Hubungan Auditor Internal dan Eksternal Terhadap Efektivitas Audit Internal.....	93
4.3.3	Pengaruh Dukungan <i>Auditee</i> terhadap Efektivitas Audit Internal ...	95

4.3.4 Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Efektivitas Audit Internal.....	98
BAB V PENUTUP.....	102
5.1 Simpulan.....	102
5.2 Keterbatasan .....	104
5.3 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	110

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel.....	47
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Efektivitas Audit Internal .....	70
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Kompetensi Auditor Internal .....	71
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Dukungan <i>Auditee</i> .....	72
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Independensi Auditor.....	73
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Hubungan Auditor Internal dengan Eksternal .....	74
Tabel 4.6 Deskripsi Pengumpulan data Kuesioner .....	75
Tabel 4.7 Data Statistik Responden .....	76
Tabel 4.8 Hasil Uji Variabel Efektivitas Audit.....	78
Tabel 4.9 Hasil Uji Variabel Kompetensi Auditor .....	79
Tabel 4.10 Hasil Uji Variabel Dukungan <i>Auditee</i> .....	79
Tabel 4.11 Hasil Uji Variabel Independensi Auditor.....	80
Tabel 4.12 Hasil Uji Variabel Hubungan dengan Auditor Eksternal.....	81
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas.....	82
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas .....	84
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas.....	85
Tabel 4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Park) .....	87
Tabel 4.17 Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	88
Tabel 4.18 Uji <i>F-Statistic</i> .....	89
Tabel 4.19 Uji <i>T-Statistic</i> .....	90
Tabel 4.20 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis.....	37
Gambar 4.1 Normal P -P Plot .....	83
Gambar 4.2 Hasil Uji <i>Scatterplot</i> Heteroskedastisitas.....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Kuesioner Penelitian.....	110
Lampiran B Surat Keterangan.....	114
Lampiran C Hasil Statistik Deskriptif.....	116
Lampiran D Hasil Uji Instrumen.....	118
Lampiran E Hasil Uji Asumsi Klasik .....	128
Lampiran F Hasil Uji Hipotesis .....	129
Lampiran G Hasil Kuesioner .....	130

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sama halnya dengan sektor swasta, sektor publik juga memerlukan lembaga baik audit internal maupun eksternal dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. *Auditing* dalam Mulyadi dan Puradireja (1998) merupakan aktivitas untuk mendapatkan dan mengevaluasi temuan yang konkret secara objektif dan sistematis berhubungan pada pernyataan-pernyataan tentang aktivitas dan peristiwa ekonomi yang berasal dari pihak manajemen yang di audit. *Auditing* sendiri bertujuan untuk menyampaikan hasil audit kepada pemakai yang berkepentingan dengan melakukan *check and balances* antara pernyataan-pernyataan manajemen dengan kriteria yang sebelumnya sudah dibuat oleh auditor merujuk pada standar yang berlaku (Mulyadi dan Puradireja, 1998). *Auditing* menurut pendapat lain merupakan kegiatan pemeriksaan bersifat objektif dan independen yang dilaksanakan pihak ketiga terkait laporan keuangan dan catatan akuntansi yang disusun oleh manajemen serta informasi pendukung lainnya untuk menilai wajar tidaknya suatu laporan keuangan (Agoes, 2012).

Audit sendiri terdiri dari audit internal dan audit eksternal. Berdasarkan *Institute Of Internal Auditors – IIA*, audit internal merupakan aktivitas yang objektif serta independen yang disusun dengan tujuan meningkatkan operasional dan nilai organisasi atau perusahaan. Internal audit dapat mendukung manajemen dalam upaya mencapai tujuan melalui pendekatan yang terstruktur serta disiplin.

Menurut Bastian (2014), audit internal adalah kegiatan *monitoring* oleh anggota di dalam perusahaan atau organisasi yang berfungsi mengevaluasi dan menilai kegiatan pengendalian yang bertujuan mengawasi seluruh pegawai perusahaan atau organisasi dalam mengerjakan pertanggungjawabannya secara efektif disertai dengan memberikan rekomendasi, telaah, serta memberikan pernyataan yang berkaitan dengan aktivitas pegawai yang diamati.

Pada awalnya, kegiatan audit internal hanya terbatas pada pengawasan kepatuhan keuangan dan pengendalian internal dalam suatu badan atau organisasi. Seiring berjalannya waktu, fungsi seorang auditor mulai bergeser menjadi konsultan internal yang memberi masukan atas perbaikan sistem yang telah ada dan sudah berjalan. Fungsi konsultan intern adalah peran yang relatif baru yang turut serta menuntut auditor internal untuk selalu meningkatkan pengetahuan tentang profesi auditor dan aspek bisnis untuk dapat memecahkan suatu masalah yang ada.

Dalam sektor publik, fungsi audit internal merupakan tanggung jawab dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Hal ini sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dalam KEP- 005/AAIPUDPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan instansi pemerintah yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan internal di wilayah pemerintah pusat dan/atau pemerintah

daerah. APIP sendiri terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat sendiri adalah sebuah instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan wewenang untuk melakukan *monitoring* terhadap peran pemerintah dalam melaksanakan program kerja, sistem pemerintahan, dan kebijakan anggaran tempat instansi tersebut bernaung. Dalam hal ini, inspektorat provinsi ikut menjadi bagian dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, inspektorat provinsi adalah perangkat daerah dibawah gubernur yang dimandatkan untuk melakukan *monitoring* fungsional terhadap kegiatan instansi/badan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya, inspektorat memiliki peran dan fungsi yang sama dengan auditor internal pada sebuah perusahaan swasta. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 mengatur perihal peran serta fungsi inspektorat provinsi. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi *monitoring* yang berkaitan dengan pemerintahan, inspektorat provinsi mempunyai beberapa tugas seperti perumusan kebijakan, perencanaan program *monitoring*, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Masalah yang sering muncul berkaitan dengan tata kelola yang berada di instansi sektor publik adalah permasalahan mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merupakan kategori *fraud* yang menyalahgunakan kewenangan atau kepercayaan dengan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan regulasi untuk memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung bagi pelaku (ACFE, 2016). Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa terdapat 576 kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2017, dengan total kerugian negara mencapai 6,5 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2016 sendiri, jumlah kasus korupsi yang terjadi yaitu 1,4 triliun rupiah. Pada tahun 2017, sejumlah 373 kasus terjadi pada lembaga pemerintahan dengan total kerugian negara ditaksir mencapai 1,3 triliun rupiah. Jumlah ini jauh meningkat dari tahun lalu, dimana pada tahun 2016, kasus korupsi yang terjadi wilayah pemerintahan hanya sejumlah 354 kasus dengan total kerugian negara sebesar 743 miliar rupiah. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas *monitoring* dan pengendalian pada wilayah daerah yang masih lemah mengakibatkan praktik tindak pidana korupsi yang tinggi.

Fungsi pengawasan dan pengendalian yang lemah merupakan akibat dari sistem audit internal yang tidak bekerja efektif. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan untuk meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akan tercapai apabila *monitoring system* berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Maka dari itu, *monitoring system* memiliki peran yang sangat penting dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. organisasi yang mempunyai kinerja internal audit yang efektif akan cenderung lebih baik untuk mendeteksi dan mencegah terhadap

kecurangan dibandingkan suatu organisasi yang tidak memiliki fungsi tersebut. Selain itu, pencapaian tujuan organisasi dapat terlaksana dengan adanya fungsi audit internal yang efektif (Badara dan Saidin, 2014). Praktik *good governance* di dalam suatu organisasi juga dapat terwujud dengan lebih mudah jika fungsi audit internal berjalan dengan baik.

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan (Mardiasmo, 2009). Kinerja organisasi dapat dikatakan berjalan dengan efektif jika tujuan dari pekerjaan yang dilakukan organisasi tersebut telah tercapai. Tercapainya tujuan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat merupakan salah satu bentuk efektivitas tata kelola perusahaan sektor publik. Menurut *United Nation Development Programme*, karakteristik *good governance* ditandai dengan sikap adil, memiliki visi kedepan, transparansi, sikap cepat tanggap dalam melayani *stakeholder*, aktif berpartisipasi, efisien dan efektif, sikap berorientasi pada kepentingan masyarakat, akuntabel, serta memiliki kerangka hukum yang adil (Mardiasmo, 2009). Audit internal dapat memainkan peran penting dalam proses pemerintahan dan akuntabilitas lembaga-lembaga sektor publik melalui penilaian auditor internal pemerintah pada efektivitas pengendalian organisasi kunci, tata kelola dan proses manajemen risiko (Asare, *et al.*, 2009). Oleh karena itu, efektivitas mengenai *good corporate governance* perusahaan dalam wilayah pemerintahan juga tercermin dari kegiatan yang dilaksanakan fungsi audit internal.

Efektivitas merupakan ukuran dalam menyatakan seberapa jauh suatu target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Semakin besar presentase target yang tercapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya (Hidayat, 1986). Dengan kata lain, jika ingin mengukur efektivitas auditor, maka perlu diketahui sejauh mana seorang auditor dapat mencapai target. Penelitian yang dilakukan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014) telah menerangkan beberapa indikator untuk menilai tingkat efektivitas audit internal. Efektivitas dapat dinilai dengan melihat keahlian auditor dalam menyusun rencana, tingkat produktivitas suatu badan, *review* terhadap hasil, implementasi rekomendasi audit internal, *review* serta memperbaiki manajemen resiko, *review* sistem pengendalian internal, dan rekomendasi dalam rangka perbaikan.

Permasalahan mengenai praktik tindak pidana korupsi yang tinggi tidak lepas dari permasalahan efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saat ini dinilai tidak mampu menanggulangi praktik tindak pidana korupsi. Secara spesifik pada praktek audit internal di daerah, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dikutip oleh Bayu (2017) mengungkapkan pihaknya tak pernah mendapatkan laporan pengawasan dari inspektorat pengawas pemerintahan, baik tingkat kabupaten/kota hingga kementerian/lembaga. Padahal, selama ini terdapat banyak kasus korupsi yang dilakukan pejabat di lingkungan pemerintah. Sebagai pengawas, seharusnya APIP yang terlebih dahulu mengetahui indikasi tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh APIP belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan Standar kinerja dari The Institute of Internal Auditors (IIA), auditor internal harus memiliki kompetensi yang memadai baik secara individu maupun kolektif, independen, dan patuh pada standar audit dan kode etik. Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dikutip oleh Ihsanuddin (2017) menyatakan bahwa jabatan-jabatan di inspektorat atau lembaga pengawasan internal di suatu instansi pemerintahan kerap diisi oleh pejabat yang tidak memiliki kompetensi di bidang pengawasan, dan kadang-kadang di banyak tempat, inspektorat menjadi tempat pembuangan. Disamping itu, faktor subjektivitas menjadi penyebab inspektorat kerap tidak efektif menjalankan peran sebagai lembaga pengawasan internal. Tingkat kompetensi yang tinggi disertai dengan wawasan yang memadai serta keterampilan yang baik pada saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat menjadi ukuran efektivitas suatu kinerja audit internal, khususnya dalam lingkungan tata kelola sektor publik.

Standar audit internal yang diterima secara umum menyatakan bahwa auditor internal tidak dituntut untuk memiliki keahlian dalam investigasi *fraud*, namun kepala bagian audit internal tetap bertanggungjawab untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi auditor internalnya pada keahlian khusus yang memungkinkan auditor internal melakukan investigasi *fraud*. Bila auditor internal memiliki keyakinan bahwa korupsi atau *fraud* secara umum telah terjadi, maka dia harus segera melaporkan temuan kecurangan tersebut kepada manajemen yang memiliki kewenangan untuk melakukan langkah tindak lanjut yang diperlukan, seperti melakukan investigasi *fraud*. Bila auditor internal memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi *fraud*, maka manajemen dapat

memberikan penugasan khusus kepada auditor internal untuk melakukan investigasi yang dimaksud.

Alzeban dan Gwilliam (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Halimah, et al. (2009), Salehi (2016), Baheri (2016), Gamayuni (2016), Jonathan (2017), dan Sari (2018). Namun, hal berbeda diungkapkan oleh Ain (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi auditor internal berpengaruh negatif terhadap efektivitas audit internal dan penelitian yang dilakukan oleh Arles, *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi auditor internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas audit internal.

Namun demikian, meskipun auditor internal memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan investigasi *fraud*, pada kenyataannya terdapat masalah independensi auditor internal. Faktor independensi auditor sangat penting sebab korupsi secara umum mungkin melibatkan level manajemen yang lebih tinggi. Pihak yang terlibat biasanya memiliki kemampuan untuk menekan atau mengintimidasi auditor, dan hasil investigasi dapat berkaitan dengan masalah hukum sehingga proses litigasi memerlukan saksi ahli yang independen dan memahami aspek hukum secara memadai.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dalam KEP-005/AAIPUDPN/2014 menjelaskan bahwa dalam semua hal yang berkaitan

dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat. Lebih lanjut, Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menjelaskan bahwa posisi APIP harus ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan *auditee* dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan *auditee* terutama dalam saling memahami diantara peranan masing-masing lembaga.

APIP sebagai fungsi auditor internal pemerintahan perlu menjalankan tanggung jawab tanpa tekanan kepentingan dari pihak lain termasuk tekanan yang berasal dari pemerintah sendiri sebagai pihak yang membuat peraturan, mencegah terjadinya konflik kepentingan, mendapatkan informasi yang tidak terbatas mengenai catatan keuangan organisasi, dan tidak melaksanakan kegiatan non-audit. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dikutip oleh Bayu (2017) menduga tidak adanya laporan dari inspektorat pengawas kepada KPK disebabkan oleh struktur kelembagaan yang berada di bawah pimpinan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga, Sehingga inspektorat takut untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan atasannya. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Independensi merupakan situasi yang bebas dari ancaman terhadap kemampuan aktivitas audit internal dalam hal menjalankan peran audit internal secara obyektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam menjalankan peran aktivitas audit internal

secara efektif, ancaman terhadap independensi perlu dikelola pada tingkat individu auditor, pemberian tugas audit internal, fungsional, serta organisasi.

Cohen dan Sayag (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa independensi auditor internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Penelitian tersebut di dukung oleh penelitian lainnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014), Jonathan (2017), Arles, *et al.* (2017), dan Sari (2018). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salehi (2016), Baheri (2016) serta Nurbayani dan Muliana (2019) yang menyatakan bahwa independensi auditor internal tidak memengaruhi secara signifikan efektivitas audit internal.

Selain itu, *dukungan auditee* dianggap sebagai faktor determinan dalam mencapai tujuan audit internal. Semakin baik persepsi *auditee* terhadap audit internal, maka manajemen akan menganggap audit internal sebagai sebuah senjata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan manajemen memberikan persepsi yang baik terhadap audit internal, maka manajemen akan merealisasikan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal (Santoso dan Suryanto, 2016). Dukungan dari *auditee* dapat menentukan kualitas dan efisiensi dari audit internal. *Auditee* adalah pihak organisasi yang diaudit. *Auditee* dalam lingkungan pemerintahan adalah manajemen dari sebuah organisasi yang menerima jasa audit oleh auditor pemerintah daerah. Sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dalam KEP- 005/AAIPUDPN/2014, *auditee* yang dimaksud adalah instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Dengan dukungan dari *auditee*, auditor internal dapat memperoleh sumber yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Manajemen organisasi yang diaudit (*auditee*) harus mempertimbangkan rekomendasi dari audit internal serta menyediakan laporan yang relevan untuk kepentingan perencanaan audit internal.

Halimah *et al.* (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dukungan *auditee* berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Penelitian tersebut juga di dukung oleh penelitian yang di lakukan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014) serta Sari (2018). Akan tetapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang di lakukan oleh Mihret dan Yismaw (2007), Cohen dan Sayag (2010) serta Santoso dan Suryanto (2016) yang menyatakan bahwa dukungan auditee tidak memengaruhi secara signifikan efektivitas audit internal.

Selain dukungan dari *auditee*, koordinasi dan kerjasama yang baik antara auditor internal dan eksternal perlu untuk dilakukan. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara keduanya baik yang dilakukan dengan cara bertukar informasi atau opini dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat mempercepat sekaligus membuat efektif kerja audit secara keseluruhan. Auditor eksternal untuk sektor publik dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berisi tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai

pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab yang bebas dan mandiri. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009-2014, Hadi Poernomo ketika menjadi pembicara dalam Seminar bertema “Peran Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia” pada 19 Desember 2012 di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta menyatakan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memerlukan sinergi yang baik dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan sinergi tersebut, diharapkan masing-masing lembaga melakukan pengecekan dan pengujian sejak dini untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara.

Alzeban dan Gwilliam (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan antara auditor internal dan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas audit internal. Penelitian tersebut juga di dukung oleh penelitian yang di lakukan oleh Santoso dan Suryanto (2016) serta Sari (2018). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Salehi (2016) yang menyatakan bahwa hubungan antara auditor internal dan eksternal tidak memengaruhi efektivitas audit internal secara signifikan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Efektivitas audit internal menjadi tantangan yang harus dihadapi baik oleh instansi pemerintah maupun swasta. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan Mardiasmo (2009). Salah satu tujuan dari fungsi

audit internal adalah mencegah dan mendeteksi *fraud*. Moeller (2009) mengemukakan bahwa auditor internal sering berada dalam posisi yang lebih baik daripada auditor eksternal untuk mencegah dan mendeteksi fraud dengan pertimbangan:

1. Auditor internal melakukan audit secara terus-menerus sehingga pencegahan dan pendeteksian *fraud* lebih mudah dilakukan.
2. Auditor internal dipandang lebih mengenal dan menguasai aktivitas dan sistem organisasi, sehingga melalui observasi dapat berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendeteksi *red flags* dari suatu *fraud*.
3. Auditor internal dapat melakukan review secara lebih terinci dan berulang terhadap transaksi dan dokumen terkait selama fase audit berjalan, sehingga potensi *fraud* lebih dapat dideteksi.

Ketika suatu aktivitas audit internal yang didalamnya terdapat unsur sistem pengawasan pengendalian internal berjalan dengan efektif, maka resiko, celah atau upaya untuk melakukan tindakan korupsi serta hal yang dapat merugikan instansi tersebut semakin dapat diminimalisir. Untuk dapat menjalankan aktivitas audit internal secara efektif, maka perlu dilakukan proses audit oleh seorang auditor internal. Dalam konteks sektor publik, pejabat yang bertugas untuk menjalankan proses audit internal adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Efektivitas dalam *good corporate governance* wilayah pemerintahan terwujudkan dari kegiatan yang dilaksanakan fungsi audit. Kompetensi auditor, independensi yang dimiliki auditor, dukungan dari *auditee*

serta faktor hubungan dengan eksternal auditor adalah beberapa faktor yang dapat menentukan berjalannya proses audit internal secara efektif.

Kompetensi menurut Wibowo (2007) adalah kemampuan suatu individu dalam mengerjakan fungsi yang didasari keterampilan, wawasan serta pengetahuan kerja yang dituntut saat melakukan tugas tersebut. Kompetensi auditor menurut Suhayati dan Rahayu (2010) adalah seorang auditor yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan keahlian dalam mengetahui kriteria serta dapat memperkirakan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan dalam mendukung kesimpulan yang akan diberikan. Dalam kaitannya dengan fungsi audit wilayah pemerintah, auditor pemerintah tidak cukup hanya dengan dibekali pengetahuan audit secara umum, tetapi juga dituntut paham tentang aspek serta unsur dalam pemerintahan, seperti struktur organisasi, fungsi, program, kode etik dan kegiatan pemerintah lainnya sehingga auditor dapat dengan mudah menjalankan fungsinya sebagai auditor internal pemerintah dengan menggunakan standar yang berlaku (Efendy, 2010). Seorang auditor yang memiliki kompetensi yang baik akan memudahkan fungsi audit dalam mencapai tujuannya. Laporan keuangan hasil audit auditor internal yang dikerjakan oleh sumber daya yang berkompeten akan memudahkan auditor eksternal dalam membuat opini yang lebih konkrit.

Independensi menurut Sawyer (2009) adalah sikap yang terbebas dari gangguan, mengeluarkan opini secara objektif dan bertanggung jawab, tidak bias, tidak terbatas, dan jujur dalam mengungkapkan suatu permasalahan, bukan karena kepentingan pihak lain. Dalam fungsi audit internal pemerintah, independensi merupakan keadaan bebas dari situasi yang mengancam dan menghalangi

kegiatan audit internal untuk menjalankan tanggung jawab audit internal secara objektif. Independensi merupakan faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi audit. Cohen dan Sayag (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa independensi auditor berhubungan positif pada efektivitas fungsi auditor internal. Auditor internal dengan independensi yang baik melaksanakan tugasnya dengan kondisi bebas dari intervensi kepentingan seperti kepentingan manajer atau pejabat pemerintah sebagai penentu kebijakan strategis di dalam suatu organisasi. Auditor internal juga dituntut menghindari konflik kepentingan serta tidak memberikan jasa lain selain pekerjaan audit.

Dukungan dari *auditee* merupakan salah satu faktor fungsi audit internal berjalan dengan efektif. *Auditee* adalah organisasi yang sedang diaudit. Cara yang tepat bagi *auditee* dalam upaya mendukung aktivitas internal audit adalah dengan memberikan keleluasaan kepada auditor internal dalam mendapatkan keterangan yang memadai untuk menjalankan fungsi audit internal.

Selain dari dukungan *auditee*, hubungan yang baik antara auditor internal dan eksternal merupakan faktor fungsi audit internal berjalan dengan efektif. Auditor eksternal untuk sektor publik dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koordinasi yang baik akan memudahkan fungsi audit internal dalam pertukaran informasi, perencanaan audit, membuat laporan audit yang memiliki kualitas tinggi, serta mencegah repetisi pekerjaan antara kedua belah pihak sehingga fungsi audit internal akan semakin efektif.

Penelitian ini hanya dilakukan di satu wilayah inspektorat, yaitu inspektorat provinsi DKI Jakarta. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat

tersebut adalah karena DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki APBD terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dilansir dari [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id), total Anggaran dan Belanja Pendapatan Daerah (APBD) provinsi DKI Jakarta mencapai 89 triliun rupiah. Hal ini menjadikan tanggung jawab akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan provinsi DKI Jakarta semakin besar agar terhindar dari resiko kerugian negara yang besar. Alasan selanjutnya adalah belum terdapatnya penelitian yang mengkaji tentang analisis determinan efektivitas audit internal di inspektorat provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bermaksud untuk menguji apakah auditor internal pada pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah berlangsung dengan efektif dalam pelaksanaan tugas APIP. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah semakin baik kompetensi auditor internal berpengaruh positif kepada efektivitas auditor ?
2. Apakah semakin baik hubungan antara auditor internal dan eksternal akan berpengaruh positif kepada efektivitas auditor?
3. Apakah semakin baik dukungan dari *auditee* akan berpengaruh positif kepada efektivitas auditor ?
4. Apakah semakin baik independensi auditor internal akan berpengaruh positif kepada efektivitas auditor ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara empiris pengaruh kompetensi auditor internal, hubungan

dengan auditor eksternal, dukungan *auditee* dan independensi terhadap efektivitas auditor internal.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor determinan efektivitas audit di lingkungan pemerintah daerah.
  - b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang faktor determinan efektivitas audit internal di lingkungan pemerintah daerah, khususnya pada instansi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini nantinya akan diserahkan kepada bagian kepegawaian Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian dalam meningkatkan kualitas dan mutu audit internal di pemerintahan sehingga dapat membantu instansi pemerintah, khususnya Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembuktian empiris mengenai faktor determinan kompetensi auditor, independensi auditor, dukungan *auditee*, dan hubungan dengan auditor eksternal terhadap efektivitas audit internal Pemerintah Daerah di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.